

# Laporan Keuangan Tahunan 2021

AUDITED

## **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Komisi Pemilihan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pajang, 14 Januari 2022  
Sekretaris  
  
**Afnel Suryasman, SH., Msi**  
**NIP. 197112121997011001**

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Painan, 14 Januari 2022

  
Sekretaris  
**Afnel Suryasman, SH., Msi**  
**NRP. 197112121997011001**

## RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.818.947.060 atau mencapai 99,66 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp6.842.471.000.

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.276.951.637 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp260.064.366; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.013.538.191 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp3.349.080.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp54.614.960 dan Rp1.222.336.677

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp7.157.555.855 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-7.157.555.855, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp24.450.000 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-7.133.105.855.

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 sebesar Rp6.986.299.290, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-7.133.105.855 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar -1.629.586.281 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 2.998.729.523 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp1.222.336.677

## **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

## LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2021	2020
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>BEBAN</b>			
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>			
Beban Pegawai	D.3	2.171.717.273	1.847.159.660
Beban Persediaan	D.4	105.171.194	1.100.436.375
Beban Barang dan Jasa	D.5	3.750.827.461	32.775.814.926
Beban Pemeliharaan	D.6	99.052.468	65.350.951
Beban Perjalanan Dinas	D.7	746.793.624	1.476.651.406
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	283.993.835	282.772.965
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	-	-
<b>Jumlah Beban</b>		<b>7.157.555.855</b>	<b>37.548.186.283</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>(7.157.555.855)</b>	<b>(37.548.186.283)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	-	64.841.700
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	24.450.000	3.029.300
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>		<b>24.450.000</b>	<b>67.871.000</b>
<b>Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa</b>		<b>(7.133.105.855)</b>	<b>(37.480.315.283)</b>
<b>Pos Luar Biasa</b>	D.15		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
-		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>		<b>(7.133.105.855)</b>	<b>(37.480.315.283)</b>

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	Catatan	2021	2020
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	<b>6.986.299.290</b>	<b>1.689.866.835</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	E.2	<b>(7.133.105.855)</b>	<b>(37.480.315.283)</b>
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS</b>	E.3	-	-
	E.4	<b>(1.629.586.281)</b>	<b>7.265.028</b>
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.4.3	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.4.4	-	7.572.000
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.5	2.196.000	(306.972)
Koreksi Lain-Lain	E.4.6	(1.631.782.281)	-
<b>Jumlah</b>		<b>(1.629.586.281)</b>	<b>7.265.028</b>
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	E.5	2.998.729.523	42.769.482.710
<b>KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>		<b>(5.763.962.613)</b>	<b>5.296.432.455</b>
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.6	<b>1.222.336.677</b>	<b>6.986.299.290</b>

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

U R A I A N	Catatan	TA 2021		% thd Angg	TA 2020 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
<b>PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>B.1</b>				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	-	-	-	64.841.700
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	-	-	<b>64.841.700</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2</b>				
Belanja Pegawai	B.2.1	2.135.484.000	2.117.102.313	99,14	1.847.159.660
Belanja Barang	B.2.2	4.706.987.000	4.701.844.747	99,89	35.100.538.248
Belanja Modal	B.2.3	-	-	-	139.673.370
Belanja Bantuan Sosial		-	-	-	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>6.842.471.000</b>	<b>6.818.947.060</b>	<b>99,66</b>	<b>37.087.371.278</b>

**NERACA**  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

U R A I A N	Catatan	2021	2020
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	5.451.999.818
Persediaan	C.4	260.064.366	260.064.366
Persediaan yang Belum Diregister	C.5	-	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>260.064.366</b>	<b>5.712.064.184</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang</b>		-	-
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.6	74.900.000	74.900.000
Tanah Belum Diregister	C.7	-	-
Peralatan dan Mesin	C.8	2.343.109.891	2.318.659.891
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.9	-	-
Gedung dan Bangunan	C.10	370.848.000	370.848.000
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.11	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.12	(1.775.319.700)	(1.494.359.135)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>1.013.538.191</b>	<b>1.270.048.756</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Lain-lain	C.13	225.929.300	225.929.300
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.14	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.15	(222.580.220)	(221.742.950)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>3.349.080</b>	<b>4.186.350</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>1.276.951.637</b>	<b>6.986.299.290</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.16	54.614.960	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.17	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.18	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.19	-	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>54.614.960</b>	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>54.614.960</b>	-
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.20	1.222.336.677	6.986.299.290
<b>JUMLAH EKUTAS</b>		<b>1.222.336.677</b>	<b>6.986.299.290</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>1.276.951.637</b>	<b>6.986.299.290</b>

**A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan**

Dasar Hukum Entitas dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan merupakan instansi vertikal yang mempunyai kewajiban dan kewenangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan.

Komisi Pemilihan Umum didirikan sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian untuk meningkatkan kualitas Pemilihan Umum dan Pemilihan di Indonesia yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, transparan dan akuntabel. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Entitas berkedudukan di Jalan H.Ilyas Yacub Painan No.39 Pesisir Selatan – Sumatera Barat.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan. Melalui peran tersebut diharapkan menghasilkan Pemilihan Umum yang berkualitas.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Komisi Pemilihan Umum mempunyai visi “Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

**A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

**A.3 BASIS AKUNTANSI**

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### Dasar Pengukuran

### A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### Kebijakan Akuntansi

### A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang merupakan entitas pelaporan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

#### Pendapatan-LRA

#### (1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### Pendapatan-LO

#### (2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
  - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
  - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu
  - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### Belanja

#### (3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

#### Beban

#### (4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### Aset

#### (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

#### Aset Lancar

##### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan
  - \* harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - \* harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - \* harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### Aset Tetap

##### b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
  - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

#### Penyusutan Aset Tetap

- c. **Penyusutan Aset Tetap**
  - Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
  - Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
    - a. Tanah;
    - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
    - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
  - Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
  - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
  - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

#### **Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap**

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

#### Piutang Jangka Panjang

- d. **Piutang Jangka Panjang**
  - Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
  - Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

#### Aset Lainnya

- e. **Aset Lainnya**
  - Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
  - Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
  - Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

### Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### Kewajiban

#### (6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### Ekuitas

#### (7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2021	Anggaran Setelah Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	-	-
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	1.899.895.000	2.135.484.000
Belanja Barang	656.979.000	4.706.987.000
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.556.874.000</b>	<b>6.842.471.000</b>

Realisasi Pendapatan  
Rp0

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0. Pendapatan ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

Uraian	2021		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami penurunan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 100,00 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

*Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020*

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	64.841.700	(100,00)
<b>Jumlah</b>	-	<b>64.841.700</b>	<b>(100,00)</b>

Realisasi Penerimaan  
Pajak Rp0

#### B.1.1 Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penerimaan Pajak TA 2021 sebesar 0,00 dari TA 2020. Rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

*Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020*

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

*Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020*

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Pengembalian Pendapatan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Pendapatan Pajak/Bea Cukai</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Realisasi Penerimaan  
Negara Bukan Pajak  
Rp0

**B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp64.841.700. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2021 mengalami penurunan sebesar 100,00 dari TA 2020 . Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

*Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020*

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	-	64.841.700	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>64.841.700</b>	<b>(100,00)</b>

Sedangkan Rincian PNPB Lainnya adalah sebagai berikut :

*Perbandingan Rincian PNPB Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020*

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	64.841.700	(100,00)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>64.841.700</b>	<b>(100,00)</b>

Realisasi Belanja  
Rp6.818.947.060

**B.2 Belanja**

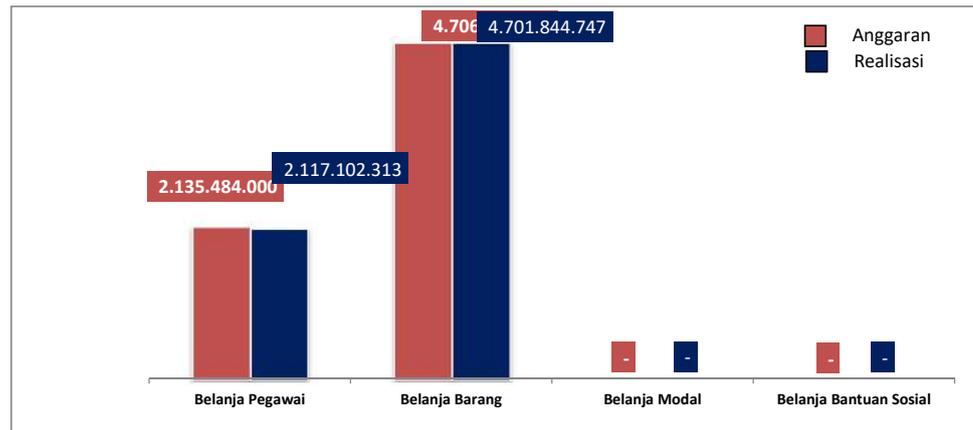
Realisasi Belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp6.818.947.060 atau 99,66 % dari anggaran belanja sebesar Rp.6.842.471.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2021*

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	2.135.484.000	2.117.102.313	99,14
Belanja Barang	4.706.987.000	4.701.844.747	99,89
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>6.842.471.000</b>	<b>6.818.947.060</b>	<b>99,66</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2021



Dibandingkan dengan TA 2020, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar 81,61% Terdapat Kenaikan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 karena adanya penambahan Pegawai Baru di Satuan Kerja KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Terjadinya penurunan Belanja Barang karena

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Pegawai	2.117.102.313	1.847.159.660	14,61
Belanja Barang	4.701.844.747	35.100.538.248	(86,60)
Belanja Modal	-	139.673.370	(100,00)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>6.818.947.060</b>	<b>37.087.371.278</b>	<b>(81,61)</b>

Realisasi Belanja Pegawai  
Rp2.117.102.313

### B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.117.102.313 dan Rp1.847.159.660. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 14,61 % dari TA 2020. Hal ini disebabkan ada penambahan CPNS baru pada tahun 2021

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Gaji Pokok PNS	440.052.340	336.066.680	30,94
Belanja Pembulatan Gaji PNS	8.321	5.718	45,52
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	37.917.850	30.201.860	25,55
Belanja Tunj. Anak PNS	10.822.138	8.057.688	34,31
Belanja Tunj. Struktural PNS	47.880.000	46.260.000	3,50
Belanja Tunj. Fungsional PNS	-	-	-
Belanja Tunj. PPh PNS	913.292	505.842	80,55
Belanja Tunj. Beras PNS	33.747.720	20.712.120	62,94
Belanja Uang Makan PNS	106.116.000	58.652.000	80,92
Belanja Tunjangan Umum PNS	20.720.000	13.295.000	55,85
Belanja Uang Lembur	45.336.000	-	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1.373.588.652	1.333.587.752	3,00
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja kotor</b>	<b>2.117.102.313</b>	<b>1.847.344.660</b>	<b>14,60</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	-	185.000	(100,00)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.117.102.313</b>	<b>1.847.159.660</b>	<b>14,61</b>

### B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.701.844.747 dan Rp35.100.538.248. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2021 mengalami penurunan sebesar 86,60% dari Realisasi TA 2020.

Hal ini antara lain disebabkan oleh terjadinya penurunan Belanja Barang karena untuk tahun 2020 adanya Pemilihan Bupati dan Wakil bupati. Penurunan beban perjalanan dinas disebabkan

*Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020*

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Barang Operasional	368.707.350	356.936.000	3,30
Belanja Barang Non Operasional	3.250.701.741	30.306.099.951	(89,27)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	106.611.194	782.607.965	(86,38)
Belanja Jasa	131.418.370	2.112.891.975	(93,78)
Belanja Pemeliharaan	97.612.468	65.350.951	49,37
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	746.793.624	1.476.651.406	(49,43)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>4.701.844.747</b>	<b>35.100.538.248</b>	<b>(86,60)</b>
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>4.701.844.747</b>	<b>35.100.538.248</b>	<b>(86,60)</b>

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp22.580.000. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp22.538.000 dengan rincian sebagai berikut :

*Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2021*

URAIAN	Anggaran	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	19.540.000	19.538.000	99,99
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	3.000.000	3.000.000	100,00
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	40.000	-	-
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>22.580.000</b>	<b>22.538.000</b>	<b>99,81</b>

### B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp139.673.370. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar 100,00% dibandingkan TA 2020 disebabkan oleh .

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	139.673.370	(100,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	<b>139.673.370</b>	<b>(100,00)</b>
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	-	<b>139.673.370</b>	<b>(100,00)</b>

Realisasi Belanja Modal Tanah Rp0

**B.2.3.1 Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2021 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan oleh .

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	-	-	-

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp0

**B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp139.673.370, mengalami penurunan sebesar 100,00 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Hal ini disebabkan oleh .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	139.673.370	(100,00)
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	<b>139.673.370</b>	<b>(100,00)</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	-	<b>139.673.370</b>	<b>(100,00)</b>

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0

**B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2020. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	-	-	-

**B.2.4 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran**

Kas di Bendahara  
Pengeluaran Rp0

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020*

Keterangan	TAHUN 2021	TAHUN 2020
-	-	-
-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Kas di Bendahara  
Penerimaan Rp0

### C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020*

Keterangan	TAHUN 2021	TAHUN 2020
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Penerimaan :

Kas Lainnya dan Setara  
Kas Rp0

### C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp5.451.999.818. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

*Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020*

Keterangan	TAHUN 2021	TAHUN 2020
Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020	-	5.451.999.818,00
-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	<b>5.451.999.818</b>

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

Persediaan  
Rp260.064.366

#### C.4 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp260.064.366 dan Rp260.064.366. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020*

Jenis	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020
Persediaan Lainnya	260.064.366	260.064.366
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>260.064.366</b>	<b>260.064.366</b>

Persediaan tersebut di atas dalam

Persediaan yang Belum  
Diregister Rp0

#### C.5 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Tanah Rp74.900.000

#### C.6 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp74.900.000 dan Rp74.900.000. Nilai Tanah tersebut . Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021</b>	<b>74.900.000</b>
<b>Mutasi tambah :</b>	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
	-
<b>Mutasi kurang :</b>	
Transfer Keluar	-
	-
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>74.900.000</b>

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2021*

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
<b>Jumlah</b>			-

*Penjelasan tentang kondisi Tanah*

Tanah Belum Diregister  
Rp0

#### C.7 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Peralatan dan Mesin  
Rp2.343.109.891

### C.8 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp2.343.109.891 dan Rp2.318.659.891. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021</b>	<b>2.318.659.891</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Perolehan Lainnya	24.450.000
	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
	-
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>2.343.109.891</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(1.740.239.486)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>602.870.405</b>

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

- Penambahan 3 Unit Notebook Asus total harga Rp 19.350.000,-
- Penambahan 2 unit Printer Epson L3110 total harga 5.100.000,-

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Peralatan dan Mesin  
Belum Diregister Rp0

### C.9 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan Bangunan  
Rp370.848.000

### C.10 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp370.848.000 dan Rp370.848.000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021</b>	<b>370.848.000</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi Kesalahan input IP	-
	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
	-
	-
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>370.848.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(35.080.214)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>335.767.786</b>

Aset Tetap yang Belum  
Diregister Rp0

### C.11 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Akumulasi Penyusutan  
Aset Tetap  
Rp1.775.319.700

### C.12 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp1.775.319.700 dan Rp1.494.359.135. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Unaudited) Tahun 2021

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.343.109.891	(1.740.239.486)	602.870.405
2	Gedung dan Bangunan	370.848.000	(35.080.214)	335.767.786
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>2.713.957.891</b>	<b>(1.775.319.700)</b>	<b>938.638.191</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

Aset Lain-lain  
Rp225.929.300

### C.13 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp225.929.300 dan Rp225.929.300. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 1 Januari 2021</b>	<b>225.929.300</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
	-
	-
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>225.929.300</b>
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021	(222.580.220)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>3.349.080</b>

Aset Lainnya yang  
Belum Diregister Rp0

### C.14 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan  
dan Amortisasi Aset  
Lainnya 222.580.220

### C.15 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp222.580.220 dan Rp221.742.950. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
<b>Aset Tak Berwujud</b>			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	225.929.300	(222.580.220)	3.349.080
-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>225.929.300</b>	<b>(222.580.220)</b>	<b>3.349.080</b>

Utang kepada Pihak  
Ketiga Rp54.614.960

### C.16 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp54.614.960 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut .:

*Rincian Utang kepada Pihak Ketiga*

Uraian	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A.2020
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	54.614.960	-
Beban Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
	-	-
<b>Total</b>	<b>54.614.960</b>	<b>-</b>

*Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :*

- Pembayaran tunjangan Kinerja bulan 12 tahun 2021 yang akan dibebankan kepada DIPA tahun 2022
- Pembayaran Uang makan Pegawai bulan 12 tahun 2021 yang akan dibebankan kepada DIPA tahun 2022

*Hibah Yang Belum Disahkan Rp0*

**C.17 Hibah Yang Belum Disahkan**

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

*Rincian Hibah Yang Belum Disahkan*

Uraian	Jumlah
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	-
	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Uang Muka dari KPPN Rp0*

**C.18 Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :*

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
<b>Total</b>	<b>-</b>

*Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :*

*Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0*

**C.19 Utang Jangka Pendek Lainnya**

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

*Ekuitas Rp1.222.336.677*

**C.20 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.222.336.677. dan Rp6.986.299.290. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**C. 21 Catatan Penting Lainnya neraca**

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Perpajakan  
Rp0

### D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	2021	2020	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

Pendapatan Negara  
Bukan Pajak Rp0

### D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	2021	2020	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan Ongkos Perkara	-	-	-
Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	-	-	-
Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah	-	-	-
Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

Beban Pegawai  
Rp2.171.717.273

### D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.171.717.273 dan Rp1.847.159.660.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2021 sebesar 17,57 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan oleh . Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Gaji Pokok PNS	440.052.340	336.066.680	30,94
Beban Pembulatan Gaji PNS	8.321	5.718	45,52
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	37.917.850	30.201.860	25,55
Beban Tunj. Anak PNS	10.822.138	8.057.688	34,31
Beban Tunj. Struktural PNS	47.880.000	46.260.000	3,50
Beban Tunj. Fungsional PNS	-	-	-
Beban Tunj. PPh PNS	913.292	505.842	80,55
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.171.717.273</b>	<b>1.847.159.660</b>	<b>17,57</b>

Beban Persediaan  
Rp105.171.194

#### D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp105.171.194 dan Rp1.100.436.375

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 90,44 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan oleh Penurunan beban persediaan disebabkan karena berkurangnya pagu anggaran belanja persediaan konsumsi. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Persediaan konsumsi	103.508.694	35.953.400	187,90
Beban Persediaan bahan baku	1.662.500	1.064.482.975	(99,84)
	-	-	-
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>105.171.194,00</b>	<b>1.100.436.375</b>	<b>(90,44)</b>

Beban Barang dan Jasa  
Rp3.750.827.461

#### D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.750.827.461 dan Rp32.775.814.926.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 88,56 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan oleh Belanja untuk penanganan Rp. . Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	3.170.738.991	27.449.972.341	(88,45)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	19.538.000	-	-
Beban Barang Operasional Lainnya	11.128.000	16.200.000	(31,31)
Beban Bahan	74.622.750	8.417.000	786,57
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	3.000.000	2.841.110.610	(99,89)
Beban Langganan Listrik	28.217.780	28.946.635	(2,52)
Beban Langganan Telepon	916.750	1.405.820	(34,79)
Beban Langganan Air	1.953.000	862.780	126,36
Beban Jasa Lainnya	100.330.840	13.253.740	657,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.750.827.461</b>	<b>32.775.814.926,00</b>	<b>(88,56)</b>

Beban Pemeliharaan  
Rp99.052.468

#### D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp99.052.468 dan Rp65.350.951.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 51,57 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan oleh Kenaikan beban

pemeliharaan disebabkan adanya beban terkait asuransi pesawat yang memiliki nilai cukup besar. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.739.000	9.400.000	67,44
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	81.873.468	55.950.951	46,33
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1.440.000	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>99.052.468</b>	<b>65.350.951</b>	<b>51,57</b>

*Beban Perjalanan Dinas  
Rp746.793.624*

#### **D.7 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp746.793.624 dan Rp1.476.651.406

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 49,43 persen disebabkan oleh . Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2021 dan 2020 :

*Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020*

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Perjalanan Biasa	746.793.624	1.476.651.406	(49,43)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi CO	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>746.793.624,00</b>	<b>1.476.651.406</b>	<b>(49,43)</b>

*Beban Barang Untuk  
Diserahkan kepada  
Masyarakat Rp0*

#### **D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2021 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan oleh. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020*

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2020	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Beban Bantuan Sosial  
Rp0

#### D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2021 sebesar 0,00 disebabkan oleh . Rincian Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Rp283.993.835

#### D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp283.993.835 dan Rp282.772.965.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	273.133.646	271.841.887	0,48
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	10.022.919	10.022.918	0,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Dig	837.270	908.160	(7,81)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumah Penyusutan</b>	<b>283.993.835</b>	<b>282.772.965</b>	<b>0,43</b>
	-	-	-
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah</b>	<b>283.993.835</b>	<b>282.772.965</b>	<b>0,43</b>

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih  
Rp0

#### D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Penyisihan Piutang PNB	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	2021	2020	0,05
Beban Penyisihan Piutang PPN	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Cukai dan Bea Materai	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	-	-	-
	2021	2020	0,05
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Surplus (Defisit)  
Penjualan Aset Non  
Lancar Rp0

#### D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp64.841.700

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	64.841.700,00	(100)
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>64.841.700</b>	<b>(100)</b>

Surplus (Defisit)  
Penyelesaian Kewajiban  
Jangka Panjang Rp0

#### D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Surplus (Defisit) dari  
Kegiatan Non  
Operasional Lainnya  
Rp24.450.000

#### D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp24.450.000 dan Rp3.029.300.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Penerimaan hibah barang dari pelaksanaan <i>beauty contest</i>	24.450.000	-	100
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	3.029.300,00	(100)
<b>Jumlah</b>	<b>24.450.000,00</b>	<b>3.029.300</b>	<b>-</b>

Mutasi transaksi Penerimaan hibah barang *beautycontest* berupa:

- Penambahan 3 Unit Notebook Asus total harga Rp 19.350.000,-
- Penambahan 2 unit Printer Epson L3110 total harga 5.100.000,-

Pos Luar Biasa Rp0

#### D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Unaudited) 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

*Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (Unaudited) 2021 dan 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	19.538.000	-	-
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	3.000.000	2.841.110.610	(99,89)
Beban Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	2.068.310.000	(100,00)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>22.538.000,00</b>	<b>4.909.420.610</b>	<b>(99,54)</b>

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 :

*Beberapa akun tidak disajikan secara khusus karena pada awal penanganan pandemi belum menggunakan akun khusus, dan telah dipertanggungjawabkan bendahara dengan SPM/SP2D GUP tanggal 5 April 2020 senilai Rp45.000.000, sehingga tidak teridentifikasi oleh sistem akuntansi*

#### D.17 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

#### E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal  
Rp6.986.299.290,00*

##### E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.6.986.299.290,00 dan Rp.1.689.866.835,00

*Defisit LO Rp.-  
7.133.105.855,00*

##### E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.-7.133.105.855,00 dan Rp.-37.480.315.283,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif  
Perubahan Kebijakan  
Akuntansi/Kesalahan  
Mendasar Rp.0,00*

##### E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

##### E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.-1.629.586.281 dan Rp.7.265.028 yaitu sebagai berikut .

*Penyesuaian Nilai Aset  
Rp.0,00*

##### E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai  
Persediaan Rp0,00*

##### E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Nilai Persediaan*

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Koreksi Atas  
Reklasifikasi Rp0,00

#### E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Selisih Revaluasi Aset  
Rp.0,00

#### E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.7.572.000,00. Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

##### Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2021

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Koreksi Aset Tetap Non  
Revaluasi Rp2.196.000

#### E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan

##### Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2021

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	2.196.000
	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.196.000,0</b>

Koreksi Lain-Lain Rp-  
1.631.782.281

#### E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.-1.631.782.281 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

##### Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2021

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	(1.631.782.281)
	-
<b>Jumlah</b>	<b>(1.631.782.281,0)</b>

Transaksi Antar Entitas  
Rp2.998.729.523

#### E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.2.998.729.523 dan Rp.42.769.482.710. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2021

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	2.748.742.851
Diterima dari Entitas Lain	-
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	364.179.000
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(114.192.328)
	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.998.729.523</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

**E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DKEL sebesar Rp 2.748.742.851, sedangkan DDEL sebesar Rp 0

**E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2021

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp0 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
-	-	-
-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>

**E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2021

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
-	-	-
<b>Total Pengesahan</b>		<b>-</b>
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2021 disajikan pada lampiran

*Ekuitas Akhir*  
*Rp1.222.336.677*

**E.6 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.1.222.336.677,00 dan Rp.6.986.299.290,00.

**E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas**

**F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**

**F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA**

**F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**